

OPINI

Layar Makin Canggih, Karakter Jangan Tertinggal: Paradoks Digitalisasi dan Peran Guru di Sekolah Dasar



Oleh: Nursida, S.Pd., M.Pd

Kepala Sekolah SDN 2 Baadia, Kota Baubau

BEBERAPA tahun terakhir, wajah ruang kelas sekolah dasar berubah. Papan tulis berdampingan dengan layar proyektor, buku cetak berbagi tempat dengan aplikasi belajar, dan tugas rumah kini bisa dikerjakan lewat gawai. Pemerintah mendorong transformasi digital pendidikan, dan arah itu patut didukung. Namun di balik kemajuan tersebut ada paradoks yang jarang dibicara-

kan: semakin canggih teknologi di tangan anak, belum tentu semakin kuat karakter yang tumbuh dalam dirinya.

Paradoks pertama adalah soal keterhubungan. Anak-anak hari ini terhubung dengan dunia tanpa batas, tetapi sering terputus dari orang-orang di dekatnya. Seorang siswa bisa menonton video dari belahan

Lanjut ke Hal: 7

Lindungi Kesehatan Siswa, Baubau Terapkan Pembelajaran Daring akibat Kabut Asap, Kualitas Udara Dievaluasi



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyusul memburuknya kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah

Lanjut ke Hal: 7

Hadiri HUT Kota Baubau ke 25 Sebagai Daerah Otonom, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Ajak Generasi Muda Lestarkan Budaya Leluhur

Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., mengajak pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah bekas Kesultanan Buton untuk menjaga warisan sejarah dan budaya sebagai identitas bersama. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri upacara Hari Jadi ke-485 Kota Baubau dan HUT ke-25 Baubau sebagai daerah otonom di Pelataran



Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Adios, sejarah di ka-

wasan Buton menjadi landasan untuk mem-

Lanjut ke Hal: 7



Baubau Expo 2026 Ditutup Meriah, Transaksi UMKM Tembus Rp816 Juta, Kotamara Dipadati Ribuan Pengunjung



Laporan: ARDI,
Baubau
Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Baubau Expo dan Pameran UMKM 2026 mencatatkan perputaran transaksi sekitar Rp816 juta sejak dibuka pada 13 Oktober hingga penutupan rangkaian kegiatan pada 17 Oktober 2026. Capaian tersebut mewarnai puncak peringatan Hari Jadi ke-485 Kota Baubau dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom yang berlangsung di kawasan Kotamara, Sabtu (17/10/2026).

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., mengatakan, peringatan hari jadi tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah dan memperkuat komitmen untuk menghadapi tantangan ke depan. Ia menyebut seperempat abad sebagai daerah otonom menjadi bagian penting dari perjalanan

Lanjut ke Hal: 7

Setahun Berjalan, Bupati Azhari Apresiasi Kemajuan SRT 1 Buton Tengah Tunjukkan Perkembangan Peserta Didik



Bupati Buton Tengah Azhari Bangga Lihat Perubahan Siswa, Sekolah Rakyat Buton Tengah Terus Berkembang

KORAN BAUBAU POST
www.durasitimes.com

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Buton Tengah menunjukkan perkembangan positif dalam membangun kepercayaan diri dan potensi peserta didik setelah menjalani pendidikan selama satu tahun. Perkembangan tersebut mendapat apresiasi Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, saat menghadiri Open House Tahun Kedua SRT 1 Buton Tengah di Kecamatan Mawasangka, Sabtu (17/10/2026). Mengusung tema

“Dulu Kami Bermimpi, Kini Kami Berani”, kegiatan tersebut menjadi ajang untuk memperlihatkan perubahan kemampuan dan keberanian siswa dalam mengikuti berbagai aktivitas sekolah. Azhari menilai, anak-anak yang sebelumnya datang dengan latar belakang serta kemampuan berbeda kini mulai percaya diri menunjukkan potensi dan mengambil peran dalam kegiatan pendidikan.

Menurut Azhari, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak merupakan salah

satu jalan strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui pendidikan, anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga kesempatan mengembangkan kemampuan, membangun kemandirian, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas program yang diberikan kepada masyarakat Buton Tengah,” ujar Azhari. Ia mengapresiasi kehad-

Lanjut ke Hal: 7

Bahlil Ungkap Sejarah Golkar, Belum Ada Ketum yang Jadi Presiden RI



Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak didirikan semata-mata untuk mengantarkan ketua umum menjadi presiden atau wakil presiden. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa (20/10/2026) malam, sekaligus menyoroti fakta sejarah bahwa belum pernah ada ketua umum Golkar yang menjabat Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil se usai menghadiri acara doa dan tasyakuran HUT ke-62 Partai Golkar. Menurut dia, orientasi partai berlabang pohon beringin itu adalah menjadi instrumen politik untuk mewujudkan cita-cita negara, termasuk keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan. “Partai Golkar itu lahir bukan hanya semata-mata untuk menjadikan ketua umum jadi presiden sama wapres. Tapi Partai Golkar ini lahir untuk menjadi instrumen politik negara dalam mewujudkan cita-cita negara,” kata Bahlil kepada wartawan. Ia juga menegaskan bahwa penambahan perolehan kursi di parlemen menjadi salah satu sasaran politik partainya. Bahlil

menyebut tujuan tersebut sebagai bagian dari doktrin Golkar yang diarahkan untuk memperkuat peran partai dalam proses politik dan pemerintahan. “Apa tujuannya Partai Golkar? Ya naikan kursi. Itu doktrinnya,” ujarnya. Secara historis, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar berdiri pada 20 Oktober 1964, menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno. Organisasi tersebut menghimpun berbagai kelompok fungsional, mulai dari organisasi pemuda, perempuan, sarjana, buruh, petani, hingga nelayan. Golkar kemudian mengikuti Pemilu 1971 dan meraih 62,82 persen suara, berdasarkan catatan resmi partai. Kemudian menjadi awal dominasi Golkar dalam pemilu tersebut menjadi awal dominasi Golkar dalam pemilu pada masa Orde Baru. Golkar kembali memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun, posisi dominan partai dalam pemilu pada periode itu tidak berbanding lurus dengan jabatan presiden yang dipegang ketua umumnya. Soeharto, yang memimpin Indonesia selama sekitar 32 tahun, tidak pernah menjabat sebagai ketua umum Golkar.

Bahlil menyebut Sudharmono sebagai satu-satunya ketua umum Golkar yang kemudian menjabat wakil presiden. Berdasarkan catatan sejarah partai, Sudharmono memimpin Golkar pada 1983-1988 sebelum mendampingi Soeharto sebagai Wakil Presiden RI periode 1988-1993. Sebelum itu, ia pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Dalam Negeri. “Dan satu-satunya Ketua Umum Partai Golkar yang jadi ketua umum dulu baru jadi wakil presiden adalah Pak Sudharmono,” kata Bahlil. Sudharmono juga dikenal sebagai tokoh militer dan pejabat penting pada masa Orde Baru. Namanya tercatat dalam sejarah politik Indonesia, termasuk dalam pembahasan mengenai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang menjadi bagian penting dari proses peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Peran dan penafsiran atas sejumlah aspek sejarah tersebut masih menjadi bagian dari kajian sejarah politik Indonesia. Setelah reformasi 1998, Golkar menyesuaikan diri dengan sistem multipartai dan mengikuti Pemilu 1999 sebagai partai politik. Pada pemilu

tersebut, Golkar menempati posisi kedua di bawah PDI Perjuangan. Bahlil mengatakan perubahan bentuk organisasi itu tidak menghilangkan orientasi partainya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks internasional, hubungan antara kepemimpinan partai dan jabatan kepala pemerintahan berbeda-beda menurut sistem politik setiap negara. Di Inggris, misalnya, pemimpin partai yang memperoleh dukungan mayoritas di House of Commons biasanya diangkat menjadi perdana menteri. Sementara itu, di Indonesia, presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan presiden sesuai konstitusi, sehingga jabatan ketua umum partai tidak otomatis mengantarkan seseorang ke kursi kepresidenan. Bahlil menegaskan bahwa Golkar sejak awal dibentuk sebagai kekuatan penyeimbang, sebelum kemudian bertransformasi menjadi partai politik dalam era reformasi. Ia menyatakan doktrin partai tetap berorientasi pada politik kesejahteraan, sementara peningkatan kursi parlemen menjadi salah satu target organisasi dalam menjalankan agenda politiknya. (*)

DPR Dukung Aturan Tak Naik Kelas SD-SMA, Literasi Siswa Jadi Sorotan



Komisi X DPR mendukung rencana kebijakan tak naik kelas untuk siswa SD-SMA mulai 2027/2028, namun mewanti-wanti dampak psikologis siswa.

Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Pemerintah menyiapkan pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas bagi siswa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027/2028. Komisi X DPR RI mendukung rencana tersebut, tetapi mengingatkan pentingnya kesiapan sekolah, penguasaan kompetensi dasar, serta pendampingan psikologis bagi peserta didik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan rencana kebijakan itu telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan penjurusan peserta didik yang disebut telah mendapat persetujuan Presiden. Kedua kebijakan tersebut masih memerlukan penyelesaian regulasi dan aturan teknis sebelum diterapkan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, mengatakan seluruh fraksi di komisinya mendukung rencana pemberlakuan kembali aturan tidak naik kelas. Namun, pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan pembelajaran di sekolah. “Kami mendukung, tapi nanti kan pasti ada pembahasan lebih lanjut, karena ada banyak hal yang juga harus kita diskusikan,” kata Esti di Sekolah Partai PDIP, Rabu (21/10/2026). Esti menilai penguasaan kemampuan dasar masih menjadi persoalan penting dalam pendidikan Indonesia. Ia menyoroti adanya siswa yang tel-

ah menyelesaikan pendidikan SD tetapi belum lancar membaca. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses pembelajaran dan standar kompetensi yang harus dicapai sebelum siswa melanjutkan ke jenjang berikutnya. “Di beberapa tempat, bahkan anak-anak lulus SD pun belum lancar membaca,” ujarnya. Menurut Esti, kebijakan tidak naik kelas telah lama diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia sebelum sempat ditinggalkan pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Ia berpesan, siswa yang belum memenuhi standar minimum penguasaan materi perlu mendapatkan kesempatan mengulang pembelajaran agar tidak semakin tertinggal. Meski demikian, Esti mengingatkan bahwa pengulangan kelas berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa. Karena itu, sekolah perlu memberikan pengayaan sejak triwulan pertama tahun ajaran kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Pendampingan tersebut juga perlu melibatkan orang tua agar hambatan belajar dapat diketahui dan ditangani lebih dini. Kualitas bahan ajar turut menjadi perhatian. Esti meminta buku pegangan siswa dikurasi secara serius agar sesuai dengan prinsip pedagogik dan mendukung pencapaian kompetensi. Penerapan kebijakan ini idealnya disertai evaluasi pembelajaran yang terukur, bukan semata-mata menjadikan nilai akademik sebagai dasar keputu-

san kenaikan kelas. Dalam perspektif internasional, laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat sekitar 11 persen siswa di negara-negara anggota OECD pernah mengulang kelas setidaknya sekali. Dalam PISA 2022, proporsinya tercatat sekitar 9 persen. OECD juga menemukan hubungan antara pengalaman mengulang kelas dan capaian akademik yang lebih rendah, tetapi temuan tersebut tidak membuktikan bahwa pengulangan kelas menjadi penyebab tunggal rendahnya prestasi siswa. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pengulangan kelas bukan satu-satunya cara untuk mengatasi ketertinggalan belajar. Dukungan tambahan, evaluasi berkala, serta intervensi sejak dini menjadi faktor penting untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan setiap sekolah memiliki guru, bahan ajar, dan sistem pendampingan yang memadai sebelum kebijakan diberlakukan pada 2027/2028. Sementara itu, terkait wacana sekolah gratis yang sebelumnya dibahas Presiden Prabowo, Abdul Mu'ti menyebut pemerintah berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Namun, rincian kebijakan sekolah gratis tersebut belum dapat diuraikan lebih lanjut berdasarkan keterangan yang tersedia. (*)

Gubernur Sultra Tinjau SMA Unggul Garuda, 12 Siswa Daerah Ini Tempuh Pendidikan



Laporan: Mashuri

KONAWA SELATAN, BP- Sebanyak 12 dari 76 siswa SMA Unggul Garuda Baru (SUGB) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), berasal dari daerah setempat. Keberadaan sekolah tersebut menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan berkualitas, yang turut mendapat perhatian Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat mengunjungi sekolah itu, Selasa (20/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, itu difasilitasi gubernur untuk meninjau fasilitas pembelajaran sekaligus berdialog dengan siswa. Sejumlah fasilitas yang ditinjau meliputi ruang kelas, kantin, perpustakaan, dan aula sekolah.

Dalam pertemuan tersebut, para siswa menceritakan pengalaman mengikuti seleksi dan menjalani pendidikan di SMA Unggul Garuda. Mereka juga mengungkapkan cita-cita, antara lain menjadi dokter dan peneliti, serta menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan belajar

di sekolah dengan fasilitas penunjang pendidikan tersebut.

Andi Sumangerukka mengatakan, kehadiran sekolah unggulan di Sultra merupakan harapan yang telah muncul sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Ia ingin anak-anak di daerah memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas dengan sarana yang memadai, sehingga mampu mengembangkan potensi dan bersaing pada jenjang pendidikan berikutnya.

“Sekolah ini tidak akan ada kalau tidak ada keinginan Bapak Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih,” ujar Andi Sumangerukka saat menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut.

Pemerintah Provinsi Sultra mendukung pembangunan SMA Unggul Garuda Baru dengan menyediakan lahan sekitar 20 hektare. Dalam skema yang dijelaskan gubernur, pemerintah daerah menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan sekolah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ia juga menyebut Sultra sebagai salah satu dari empat provinsi yang telah memiliki SMA Unggul Garuda.

Menurut gubernur, program terse-

but menjadi peluang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di Sultra. Selain 12 siswa asal daerah itu, tenaga pendidik asal Sultra juga turut mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut.

Kepada para siswa, Andi Sumangerukka berpesan agar kesempatan belajar dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan akademik sekaligus membangun karakter. Ia menekankan pentingnya kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai bekal untuk menghadapi tantangan masa depan.

Ia menilai pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. Kekayaan alam, kata dia, dapat habis, tetapi sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan dan kemajuan Sulawesi Tenggara.

Program SMA Unggul Garuda memiliki landasan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 20 November 2025. Program ini dirancang untuk menyiapkan peserta

didik dengan kompetensi unggul, terutama dalam bidang sains dan teknologi, serta memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berkualitas.

Dalam konteks nasional, kebijakan tersebut beririsan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Pada tingkat internasional, upaya memperluas akses pendidikan juga telah menjadi agenda bersama sejak Deklarasi Pendidikan untuk Semua yang disepakati dalam konferensi dunia di Jomtien, Thailand, pada Maret 1990.

Andi Sumangerukka berharap para siswa dapat menuntaskan pendidikan dengan baik, mengembangkan kemampuan sesuai bidang masing-masing, dan kelak kembali mengabdikan ilmu mereka untuk membangun Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan prestasi akademik, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. (*)

BPK RI Bedah Kinerja RSUD Kota Kendari, Efektivitas Layanan Jadi Sorotan



Laporan: Lisna

KENDARI, BP-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mulai melakukan pemeriksaan terinci terhadap kinerja dan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari, Rabu (21/10/2026). Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan pengelolaan, mengevaluasi efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemeriksaan tersebut diawali dengan entry meeting di RSUD Kota Kendari yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa BPK RI La Ode Muhammad Falihin beserta tim, Inspektur Kota Kendari, Sekretaris Dinas Kesehatan, Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kota Kendari, serta jajaran manajemen rumah sakit dan instansi terkait.

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa BPK RI La Ode Muhammad Falihin menjelaskan, pemeriksaan kinerja berbeda dari pemeriksaan laporan keuangan maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan ini berfokus pada aspek yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan rumah sakit.

Menurut Falihin, salah satu aspek yang perlu dievaluasi ialah pengelolaan persediaan dan pemanfaatan sumber daya agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang menghambat optimalisasi fungsi rumah

sakit sebagai penyedia layanan kesehatan.

“Tujuannya adalah bagaimana kita mencari atau menilai apa saja yang menghambat efektivitas terhadap rumah sakit dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Karena kalau rumah sakit kan memang dia kan lebih kepada servis. Semakin bagus servisnya, semakin bagus ke rumah sakit,” jelas Falihin.

Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menyatakan pemerintah daerah mendukung pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan tata kelola RSUD. Pemeriksaan terinci itu merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Amir meminta Direktur RSUD Kota Kendari beserta jajarannya, Inspektorat Daerah, dan instansi terkait bersikap kooperatif dengan menyediakan data serta informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Dukungan tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjawab persoalan pengelolaan rumah sakit.

“Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola RSUD Kota Kendari agar semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Amir.

Pemerintah Kota Kendari berharap hasil pemeriksaan tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi menjadi dasar perbaikan yang terukur. Peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat, menurut Amir, harus menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan rumah

sakit, termasuk dalam memperkuat integritas dan profesionalisme jajaran pengelola.

Secara historis, BPK RI telah menjalankan fungsi pemeriksaan keuangan negara sejak 1 Januari 1947, ketika lembaga tersebut mulai beroperasi di Magelang dengan sembilan pegawai. Mandat pemeriksaan itu berakar pada UUD 1945 dan kini ditegaskan dalam Pasal 23E, yang mengatur kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri. Kerangka hukumnya antara lain diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Dalam konteks internasional, perhatian terhadap kinerja sistem kesehatan juga telah berkembang menjadi agenda penting. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan The World Health Report 2000: Health Systems “Improving Performance”, yang membahas cara menilai dan meningkatkan kinerja sistem kesehatan dengan sumber daya yang tersedia. WHO juga menekankan pentingnya layanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses masyarakat tanpa menimbulkan kesulitan keuangan.

Melalui pemeriksaan terinci ini, BPK diharapkan mengidentifikasi kendala utama dalam pengelolaan RSUD Kota Kendari dan menyampaikan rekomendasi perbaikan. Hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan yang ditemukan, dengan tindak lanjut dari pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit guna meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya serta mutu pelayanan kepada masyarakat. (*)

Pemkab Buton Latih 150 Peserta Tangkal Hoaks Lewat Bimtek Literasi Informasi



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi digital melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi Tahun 2026 yang melibatkan 150 guru, tenaga perpustakaan, dan pegiat literasi. Kegiatan selama tiga hari, 12-14 Oktober 2026, di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton itu menitikberatkan pada pentingnya verifikasi informasi untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., membuka kegiatan tersebut pada Senin (12/10/2026), mewakili Bupati Buton. Ia menilai, derasnya arus informasi di era digital menuntut masyarakat memiliki kecakapan untuk membedakan informasi yang benar, keliru, dan tidak bermanfaat.

"Informasi yang kita terima tidak boleh ditelan mentah-mentah, tetapi harus diverifikasi," kata Syamsudin dalam sambutannya.

Menurut dia, kemudahan mengakses informasi melalui internet telah mengubah cara

masyarakat memperoleh pengetahuan. Informasi dari berbagai wilayah dapat diterima dalam hitungan detik, tetapi kecepatan penyebarannya tidak selalu diikuti dengan jaminan kebenaran.

Syamsudin mengingatkan, masyarakat perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis sebelum maupun menyebarkan suatu informasi. Tanpa kecakapan tersebut, kemajuan teknologi berpotensi menjadi saluran penyebaran kabar bohong dan disinformasi yang dapat memengaruhi cara pandang publik.

"Membaca adalah jendela dunia. Jadi, bagi yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan dunia adalah dengan membaca. Bagi kita umat Islam dimulai dari 'Iqra', bacalah," ujarnya.

Ia juga mendorong perpustakaan daerah agar terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Perpustakaan, katanya, tidak cukup hanya menjadi tempat membaca buku cetak, tetapi harus berkembang sebagai ruang pembelajaran yang dinamis dan mendukung peningkatan literasi digital masyarakat.

Penguatan literasi tersebut memiliki relevansi dengan kebijakan nasional. Pada 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Nasional untuk memperkuat budaya literasi melalui lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program tersebut menegaskan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kecakapan memahami serta memanfaatkan informasi.

Di tingkat internasional, UNESCO menetapkan 23 April sebagai Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia pada 1995 untuk mendorong budaya membaca serta memperluas akses masyarakat terhadap buku. Perkembangan literasi kemudian semakin berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghadapi arus informasi digital dan menilai kredibilitas sumber informasi.

Bimtek Literasi Informasi Kabupaten Buton menghadirkan Herlina Werianty, S.Sos., S.IK., M.M., Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Ce-

cep Ibrahim, S.IP., M.IP., dosen Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Halu Oleo, Kendari, sebagai narasumber.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bunda Literasi Kabupaten Buton, Ny. Maimuna Moko Syarifudin, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta staf ahli Bupati Buton. Pelibatan unsur pendidikan, perpustakaan, dan pegiat literasi diharapkan dapat memperluas penerapan kecakapan literasi informasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Buton mendorong terbentuknya masyarakat yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu menganalisis, memverifikasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Penguatan kapasitas tersebut menjadi salah satu langkah untuk membangun budaya literasi yang relevan dengan tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di era digital. (*)

Rakor PKK Sultra Jadi Momentum Buton Perkuat Program Kesejahteraan Keluarga



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton memprioritaskan peningkatan literasi masyarakat dan pencegahan stunting dalam rencana program kerja 2027. Kedua agenda tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Wisata Wakatobi, Rabu (14/10/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas keluarga dan menyelaraskan program antardaerah.

Ketua TP-PKK Kabupaten Buton, Ny. Maimunah Moko Syarifudin, mengatakan koordinasi tingkat provinsi menjadi kesempatan untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat di daerah dengan arah program PKK Sulawesi Tenggara. Forum tersebut juga membuka ruang pertukaran pengalaman dan penguatan kerja sama antarpengurus PKK kabupaten/kota.

"Rakor ini menjadi forum penting untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan berkolaborasi antara jajaran TP-PKK dengan daerah lain di Sultra terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja sesuai kebutuhan masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) PKK," katanya.

Salah satu program yang menjadi perhatian TP-PKK Buton ialah Gelari

Pelangi atau Gerakan Gemar Membaca yang berada di bawah koordinasi Pokja II. Program ini diarahkan untuk menumbuhkan minat baca anak sejak dini, meningkatkan literasi masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Agenda berikutnya adalah Program Peduli Stunting yang menjadi fokus Pokja IV. Pelaksanaannya direncanakan melalui edukasi gizi, pendampingan kesehatan ibu dan anak, serta koordinasi lintas sektor guna mendukung pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari Andi. Kegiatan diikuti pengurus Pokja I, II, III, dan IV dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Selain membahas rencana program prioritas 2027, forum tersebut menjadi sarana evaluasi capaian kegiatan yang telah berjalan dan perumusan langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan daerah. Penyelarasan program diharapkan membuat pelaksanaan kegiatan PKK lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Komitmen TP-PKK Buton juga diarahkan pada pelaksanaan program hingga tingkat desa dan kelurahan.

Langkah ini penting agar kegiatan peningkatan literasi maupun pencegahan stunting tidak berhenti pada perencanaan, tetapi menjangkau keluarga sebagai penerima manfaat utama.

Secara historis, gerakan PKK di Indonesia berkembang dari program pendidikan kesejahteraan keluarga yang dirintis pada 1957 di Bogor, Jawa Barat. Dalam perkembangannya, PKK menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan keluarga dan kader di berbagai tingkatan pemerintahan.

Di tingkat global, perhatian terhadap kualitas keluarga juga tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Agenda tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan melalui Tujuan 4, perbaikan gizi melalui Tujuan 2, serta kesehatan dan kesejahteraan melalui Tujuan 3.

Melalui koordinasi di Wakatobi, TP-PKK Kabupaten Buton berharap kerja sama dengan TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah daerah semakin kuat. Sinergi tersebut diharapkan mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui program yang berkelanjutan. (*)

Kemenkes Ungkap Kesenjangan Pengobatan Depresi, Baru 12,7 Persen Penderita Berobat

Peliput: Andina L

JAKARTA,BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyoroti rendahnya akses pengobatan gangguan kesehatan jiwa di Indonesia. Data Kemenkes menunjukkan baru 12,7 persen penderita depresi yang menerima pengobatan, sementara keterbatasan tenaga profesional dan ketimpangan distribusi layanan masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengungkapkan persoalan tersebut dalam rangkaian Festival Suara Jiwa di Jakarta, Minggu (11/10/2026). Berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023, gangguan jiwa menempati posisi kedua sebagai penyebab terbesar Years Lived with Disability (YLD) di Indonesia. Depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia menjadi kontributor utama beban tersebut.

“Pada kasus depresi, baru 12,7 persen penderita yang menerima pengobatan. Artinya, hampir 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum tersentuh penanganan medis,” kata Endang.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen. Sementara itu, prevalensi gangguan jiwa berat tercatat sebesar 4 per 1.000 anggota rumah tangga. Data tersebut memperlihatkan pentingnya memperluas akses deteksi dini, pendampingan, dan pengobatan agar masyarakat yang membutuhkan tidak terhambat memperoleh layanan.

Kesenjangan layanan juga terlihat dari jumlah tenaga profesional. Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 1 September 2026 mencatat Indonesia memiliki



1.495 psikiater, atau satu psikiater untuk setiap 180.000 penduduk. Rasio itu masih jauh dari acuan yang disebutkan Kemenkes, yakni satu psikiater untuk setiap 30.000 penduduk. Dari 3.513 psikolog klinis yang terdata, hanya 213 orang bertugas di Puskesmas.

Untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini, Kemenkes mengandalkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan. Hingga saat ini, skrining kesehatan jiwa melalui program Kemenkes telah menjangkau lebih dari 71,8 juta jiwa. Hasil skrining menemukan dugaan gejala depresi pada 1,2 persen sasaran dan gejala kece- masan pada 0,9 persen sasaran.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkes meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, orang dewasa, serta lanjut usia. Buku tersebut disusun bersama para ahli dari organisasi profesi untuk menjadi panduan praktis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono menegaskan, kesehatan jiwa harus ditempatkan sebagai bagian utama pembangunan manusia. Saat membuka talk-show bertajuk “Sehat Jiwaku, Unik Caraku:

Keluarga Merangkul, Kesehatan Jiwa Terjaga, Neurodivergen Berdaya”, ia mengingatkan bahwa persoalan kesehatan jiwa tidak boleh lagi dipinggirkan dalam agenda pembangunan nasional.

“Kesehatan jiwa yang lebih kuat mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul,” ujar Dante.

Dante juga mendorong pendekatan inklusif terhadap individu neurodivergen, termasuk mereka yang mengalami Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan disleksia. Ia mencon- tohkan Jacques Du- bochet, peraih Nobel Kimia 2017 yang mengalami disleksia, un- tuk menegaskan bahwa tantangan belajar tidak serta-merta menentukan masa depan seseorang. Menurut dia, keluarga dan masyarakat perlu memberikan ruang bagi setiap anak untuk mengembangkan ke- mampuan tanpa stigma dan diskriminasi.

Persoalan tersebut sejalan dengan agenda kesehatan jiwa glob- al. Pada 2008, Organ- isasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan program Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) untuk mem- perluas penanganan gangguan mental, neu- rologis, dan penggu- naan zat, terutama di negara berpendapatan rendah dan menen- gah. Pada 2013, Ma- jelis Kesehatan Dunia mengadopsi Rencana

Aksi Kesehatan Jiwa Komprehensif 2013- 2020, yang kemudian diperpanjang hingga 2030. Agenda tersebut menekankan penguatan layanan berbasis komu- nitas, pencegahan, tata kelola, serta pemerata- an akses pengobatan.

Di Indonesia, per- hatian terhadap kese- hatan jiwa juga memi- liki landasan historis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Regulasi terse- but kemudian dicabut setelah berlakunya Un- dang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perkem- bangan kebijakan itu memperlihatkan bahwa penguatan layanan kes- ehatan jiwa telah men- jadi bagian dari agenda pembangunan kese- hatan nasional, meskipun tantangan pemerataan tenaga profesional dan akses pengobatan ma- sih memerlukan perha- tian.

Melalui penguatan skrining, layanan prim- er, panduan bagi tenaga kesehatan, serta dukun- gan keluarga, Kemen- kes berupaya mem- perluas penanganan kesehatan jiwa di ber- agai kelompok usia. Tantangan berikutnya ialah memastikan hasil deteksi dini benar-benar ditindaklanjuti dengan layanan yang mudah dijangkau, bermutu, dan berkelanjutan agar masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk hidup se- hat dan mengembang- kan potensinya.(*)

Kemenkes Raih Empat Penghargaan AHI 2026, Perkuat Transparansi Informasi Publik

Laporan: Ardi

SURAKARTA, BP- Kementerian Kes- ehatan (Kemenkes) meraih empat peng-hargaan institusional dalam ajang Anugerah Humas Indone- sia (AHI) 2026 yang digelar di Kompleks Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026). Prestasi tersebut diraih melalui pengelolaan kanal digi- tal dan media inter- nal, sekaligus menjadi dorongan bagi pengua- tan komunikasi publik yang transparan, re- sponsif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi informasi.

Kemenangan Ke- menkes tersebar pada sejumlah unit kerja, yakni Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Bandung, Poltekkes Kemenkes Jakarta II, serta Poltekkes Ke- menkes Semarang. Selain penghargaan in- stitusional tersebut, in- san humas Kemenkes juga mencatat prestasi individu melalui ajang Kartini Humas Indone- sia (KaHI) 2026.

Dalam kategori General Winner, Biro Komunikasi dan Infor- masi Publik Kemenkes memperoleh Bronze Winner untuk kategori Kanal Digital melalui akun Instagram @li- featkemenkes. Peng-hargaan serupa diraih Poltekkes Kemenkes Bandung dan Poltek- kes Kemenkes Jakarta II melalui akun In-stagram resmi mas- ing-masing.

Sementara itu, Poltekkes Kemen- kes Semarang meraih Bronze Winner kat- egori Media Internal melalui video profil bertajuk Garda Terde- pan Kesehatan. Peng-hargaan ini menambah capaian Kemenkes da- lam pemanfaatan me- dia digital dan pro- duksi konten untuk mendukung komuni- kasi di lingkungan in- stitusi kesehatan.

Di luar penghargaan institusional, Nalurita Palupi dari Balai Pela-

tihan Kesehatan (Bapel- kes) Mataram meraih Silver Winner dalam ajang KaHI 2026 untuk kategori Generasi X. Gagasannya mengang- kat isu kepedulian terha- dap kesehatan mental, memperlihatkan bahwa komunikasi kesehatan juga mencakup upaya meningkatkan perhatian masyarakat terhadap as-pek psikologis.

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Luthfi Rusyadi, men- yampaikan apresiasi kepada seluruh unit Kemenkes yang mem- peroleh penghargaan. Ia berharap capaian tersebut menjadi pema- cu bagi praktisi humas untuk meningkatkan mutu komunikasi dan pelayanan informasi ke- pada masyarakat.

“Selamat dan suk- ses serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas Anugerah Humas In- donesia 2026 yang telah diperoleh untuk pemenang dari lintas program Kemenkes,” ujar Luthfi.

Menurut dia, peng-hargaan tersebut seha- rusnya tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi dorongan untuk mengembangkan ino-vasi dan kreativitas dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Keterbukaan infor- masi, kata dia, perlu terus diperkuat agar publik dapat mengakses in- formasi yang relevan mengenai program dan layanan kesehatan.

AHI 2026 merupa- kan penyelenggaraan kedelapan ajang peng-hargaan kehumasan yang mengusung tema “Membangun Trans- paransi, Memperkuat Kepercayaan Publik”. Tahun ini, kompetisi tersebut menerima 371 entri dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia.

Pendiri sekaligus CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan, menilai tingginya partisipasi tersebut mencermink- an dedikasi praktisi humas dalam memb-angun keterbukaan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Menurut

penyelenggara, pros- es penilaian dilakukan melalui tahapan yang ketat dan melibatkan dewan juri.

Dalam konteks na- sional, keterbukaan in- formasi publik memi- liki landasan hukum melalui Undang-Un- dang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu- kaan Informasi Publik. Regulasi tersebut men- jadi bagian penting da- lam mendorong badan publik menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat se- suai ketentuan. Dengan demikian, komunika- si institusi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga pe- menuhan hak ma- syarakat atas informasi.

Pada tingkat inter- nasional, komunikasi kesehatan berkembang menjadi bagian pen- ting dari upaya per- lindungan kesehatan masyarakat. Organi- sasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya informasi yang kredibel, terbuka, dan dapat dipercaya, terutama dalam situasi darurat kesehatan. Pen- galaman pandemi dan berbagai wabah sebel- umnya juga menunjuk- kan bahwa informasi yang tidak memadai dapat memperbesar kebingungan dan me- nyulitkan masyarakat mengambil keputusan yang tepat.

Capaian Kemenkes dalam AHI 2026 pun menempatkan tanta- nagan berikutnya pada keberlanjutan kualitas komunikasi publik. Penghargaan men- jadi salah satu ben- tuk pengakuan, tetapi dampaknya tetap perlu ditunjukkan melalui informasi yang akurat, mudah dipahami, tepat waktu, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam sektor kesehatan, ko- munikasi yang baik berperan penting un- tuk membantu ma- syarakat memahami kebijakan, mengenali risiko, dan meman- faatkan layanan yang tersedia.(*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Ja- maluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Puluhan Pocong Mini Gegerkan Magelang, Dokter Pastikan Tulang Bukan Manusia



Dokter memeriksa puluhan bungkus kain kafan mirip pocong bayi berserakan yang ditemukan di daerah Cangkuk, Kota Magelang.

Laporan: Amran

MAGELANG, BP- Penemuan lebih dari 20 bungkus menyerupai pocong bayi di kawasan Cangkuk, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, sempat meresahkan warga. Setelah diperiksa, dokter RSUD Tidar menyimpulkan tulang-tulang yang ditemukan di dalam kain kafan tersebut bukan kerangka manusia, melainkan diduga berasal dari hewan berkaki empat.

Kapolres Magelang Kota AKBP Dikri Olfandi mengatakan, kepolisian telah menindaklanjuti laporan warga dan memeriksa temuan tersebut. Untuk mencegah keresahan berlanjut, tulang-tulang itu direncanakan dikuburkan.

"Jadi tidak ada satu pun indikasi tulang manusia. Adapun sumbernya dari tanah urukan yang dibuang di Cangkuk. Tulang-tulang ini akan kita kubur agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Dikri, Selasa (20/10/2026).

Dokter RSUD Tidar, dr. Arso Pranindyo Utomo, menjelaskan, pemeriksaan menemukan tulang rahang berukuran kecil, gigi tajam,

serta sejumlah tulang kaki yang tidak sesuai dengan anatomi manusia. Temuan empat tulang kering dan empat tulang paha menjadi salah satu petunjuk bahwa material tersebut bukan berasal dari tubuh manusia.

Arso menduga tulang-tulang itu berasal dari hewan berkaki empat, seperti kucing atau anjing. Namun, ia belum dapat memastikan jenis hewan tersebut. Penemuan kulit dengan bulu tebal juga memperkuat dugaan bahwa material di dalam bungkus merupakan sisa tubuh hewan.

Kasus ini bermula ketika seorang warga yang sedang mencari barang bekas menemukan bungkus kecil terbungkus kain kafan dan diikat menggunakan kain mori di halaman Masjid Jamia'ur Rochmah. Lokasi tersebut sebelumnya menerima pembuangan tanah urukan dan sisa material bangunan karena kondisi tanah yang rendah dan miring.

Ketua RW 21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Lukisno, mengatakan menerima laporan warga pada 19 Oktober sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah mendatangi lokasi, ia melihat banyak bungkus

menyerupai pocong berukuran kecil. Warga tidak berani membukanya karena khawatir isinya merupakan jasad bayi.

Lukisno kemudian melaporkan temuan tersebut kepada petugas. Personel Polres Magelang Kota dan Polsek Magelang Tengah mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan, memasang garis polisi, serta membawa dua sampel bungkus untuk diperiksa lebih lanjut. Jumlah bungkus yang kemudian dikumpulkan tercatat lebih dari 20.

Sebelum hasil pemeriksaan keluar, warga sempat menduga bungkus itu berisi jasad bayi akibat praktik aborsi ilegal. Lukisno mengaku sempat merasa syok dan tidak tenang selama dua hari. Setelah dokter menjelaskan hasil pemeriksaan di lokasi, ia merasa lega karena kekhawatiran warga mengenai penemuan jasad bayi tidak terbukti.

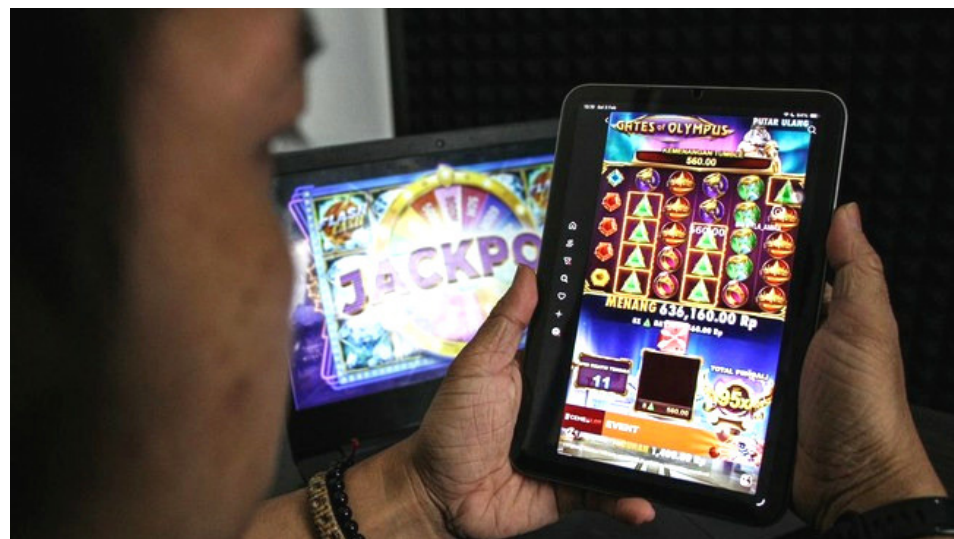
Rekaman penemuan bungkus tersebut kemudian menyebar di media sosial, salah satunya melalui akun Instagram @kotamagelang. Video itu memperlihatkan kain-kain menyerupai pocong berserakan di antara timbunan

material bangunan, sehingga memicu perhatian dan kekhawatiran masyarakat.

Dalam konteks historis, kasus salah identifikasi tulang bukan hal yang asing dalam pemeriksaan forensik internasional. Sebuah kajian yang diterbitkan dalam American Journal of Forensic Medicine and Pathology pada Desember 2001 mendokumentasikan kasus material nonmanusia yang semula dianggap sebagai sisa tubuh manusia dan memicu penyelidikan kepolisian. Penelitian lain di Jerman yang terbit pada 2023 juga mencatat bahwa tulang hewan dapat keliru dilaporkan sebagai tulang manusia, sehingga pemeriksaan ahli diperlukan untuk memastikan asalnya.

Peristiwa di Magelang ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan medis dan forensik sebelum menarik kesimpulan mengenai temuan yang diduga berkaitan dengan jasad manusia. Kepastian dari pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk menindaklanjuti temuan secara tepat sekaligus meredakan keresahan warga. (*)

Letkol Arman Jadi Tersangka, Rumah Dinas di Cijantung Diduga Jadi Markas Judol



Kasi Intel Gartap 1 Jakarta, Letkol Inf Arman Jab telah ditetapkan sebagai tersangka buntut kasus rumah dinas yang diduga menjadi markas operasional judi online di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur.

Ilustrasi

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Dugaan penyalahgunaan rumah dinas untuk operasional judi online menyeret Kasi Intel Gartap 1 Jakarta, Letkol Inf Arman Jab, menjadi tersangka. Arman kini ditahan di Pomdam Jaya setelah rumah dinas di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, diduga digunakan sebagai tempat menjalankan aktivitas perjudian daring.

Penetapan tersangka itu dikonfirmasi Danpomdam Jaya/Jayakarta, Kolonel Cpm Unggul Wahyudi, di Polda Metro Jaya, Rabu (21/10/2026). Menurut dia, proses hukum terhadap Arman masih berlangsung.

"Sudah tersangka, sekarang masih dalam proses," kata Unggul.

Unggul menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran penggunaan rumah dinas, termasuk dugaan penyewaan fasilitas yang semestinya digunakan sesuai peruntukannya. Arman telah ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini terungkap setelah petugas TNI AD memeriksa sebuah rumah di Kompleks KPAD Cijantung pada Minggu

(4/10/2026). Di sejumlah ruangan, petugas menemukan komputer yang diduga digunakan untuk menjalankan sistem operasional judi online.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan 11 warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Mereka dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk diperiksa lebih lanjut guna mendalami dugaan aktivitas perjudian daring di lokasi itu.

Petugas juga menyita 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP). Barang-barang tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang berkaitan dengan penyelidikan kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa prajurit yang terbukti terlibat praktik judi online akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Proses hukum sedang berjalan, pasti sanksi diberikan sesuai tingkatan pelanggaran hukumnya," kata Nas.

Penanganan perkara ini berlangsung di tengah

upaya pemerintah memperketat pemberantasan perjudian daring. Pada 14 Juni 2024, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring untuk memperkuat koordinasi pencegahan dan penegakan hukum.

Persoalan judi online juga melampaui batas nasional. Laporan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyoroti pertumbuhan operasi perjudian daring lintas negara di kawasan Asia Tenggara, yang didukung perkembangan internet, platform digital, dan metode pembayaran elektronik. Kondisi tersebut membuat penanganannya memerlukan kerja sama antarnegara selain penegakan hukum di dalam negeri.

Dalam perkara Cijantung, penyelidikan masih berjalan untuk mendalami dugaan penyalahgunaan rumah dinas dan peran pihak-pihak yang terlibat. Penetapan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan; pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku. (*)

Baubau Expo 2026 Ditutup Meriah, Transaksi UMKM Tembus Rp816 Juta, Kotamara Dipadati Ribuan Pengunjung

Kota Baubau menuju daerah yang mandiri dan berdaya saing.

“Peringatan Hari Jadi dan HUT Kota Baubau kali ini kita bingkai dengan tema “Kota Baubau: Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera,”kata Yusran dalam sambutannya pada malam ramah tamah di Kotamara.

Menurut dia, tema tersebut mengandung pesan agar masyarakat dan pemerintah terus bergerak maju tanpa meninggalkan adat istiadat serta nilai-nilai luhur budaya Buton. Pembangunan, kata dia, perlu berjalan beriringan dengan pelestarian tradisi yang menjadi identitas masyarakat setempat.

Dari sisi ekonomi, Baubau Expo menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Baubau memandang kegiatan semacam ini sebagai salah satu sarana untuk memperluas pemasaran produk lokal dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Yusran mengatakan, capaian transaksi selama pameran menunjukkan adanya aktivitas ekonomi

yang tumbuh di tengah perayaan hari jadi. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Rangkaian peringatan Hari Jadi Baubau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom juga diisi berbagai kegiatan kebudayaan dan olahraga tradisional. Agenda tersebut meliputi lomba perahu hias, dayung koli-koli, Karnaval Budaya, Ritual Santiago, Tutturangina Batuwampone, dan Haroana Andala. Berbagai kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur dan identitas budaya masyarakat Wolio.

Puncak perayaan ditandai dengan malam ramah tamah yang berlangsung meriah. Penyanyi asal Maluku, Mitha Talahatu, bersama sejumlah artis lainnya tampil menghibur warga. Ribuan masyarakat memadati kawasan Kotamara untuk menyaksikan pertunjukan sekaligus mengikuti penutupan rangkaian Baubau Expo 2026. Acara tersebut dihadiri ang-

gota DPR RI H. Ali Mazi, S.H.; perwakilan Gubernur Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., selaku Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H.; Bupati Buton Selatan H. Muh. Adios; Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.; Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri, S.T., M.Si.; Sekda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos., M.Si.; serta Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Natas Aryu Prawira Tamim, S.M., M.M., dan Adrian-syah Farmin, S.T. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Baubau dan tamu undangan lainnya.

Dengan berakhirnya rangkaian perayaan pada 17 Oktober, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan capaian ekonomi dan partisipasi masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan berikutnya. Tantangan selanjutnya ialah memastikan manfaat promosi dan transaksi selama pameran dapat berlanjut menjadi peningkatan kapasitas usaha serta perluasan pasar bagi UMKM lokal. (*)

Lindungi Kesehatan Siswa, Baubau Terapkan Pembelajaran Daring akibat Kabut Asap, Kualitas Udara Dievaluasi

uti wilayah tersebut. Kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan pada peserta didik sembari menunggu kualitas udara kembali aman.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, La Mane, mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan pemantauan bersama Dinas Kesehatan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kondisi kabut asap sempat memburuk pada 18 Oktober 2026 sehingga diperlukan langkah antisipasi untuk melindungi siswa.

“Sebelumnya pada tanggal 18 Oktober, kondisi kabut asap di Kota Baubau sempat memburuk. Oleh karena itu, langkah antisipatif yang kami lakukan adalah meliburkan sementara peserta didik tingkat SD dan SMP agar tetap aman,” ujar La Mane kepada Baubau Post, Selasa (20/10/2026).

Meski pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, kegiatan pendidikan tidak sepenuhnya diliburkan. Siswa tetap mengikuti pembelajaran secara dalam jaringan (daring), sedangkan tenaga pendidik tetap hadir di sekolah dan diharapkan memantau perkembangan belajar peserta didik dari rumah.

La Mane mengatakan, pemerintah belum menetapkan batas waktu berakhirnya kebijakan tersebut. Pembelajaran tatap muka akan kembali diberlakukan setelah Dinas Kesehatan dan BMKG menyatakan kualitas udara telah membaik dan aman bagi kesehatan.

Langkah pencegahan ini sejalan dengan perhatian dunia terhadap dampak polusi udara bagi anak-anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, pada 2019, sekitar 99 persen penduduk dunia tinggal di wilayah yang kualitas udaranya tidak memenuhi pedoman kualitas udara WHO. Polusi udara juga menjadi salah satu risiko lingkungan terbesar bagi kesehatan anak.

Pengalaman Indonesia pada 2019 juga menunjukkan dampak kabut asap terhadap pendidikan. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan menyebabkan penutupan sekolah akibat kualitas udara yang membahayakan kesehatan. Di tingkat regional, kabut asap lintas negara turut menjadi persoalan berulang di Asia Tenggara.

Dengan demikian, pemulihan kualitas udara menjadi faktor utama penentuan jadwal pembelajaran tatap muka di Baubau. Pemerintah daerah masih menunggu hasil pemantauan instansi terkait sebelum memastikan siswa dapat kembali belajar di sekolah. (*)

Layar Makin Canggih, Karakter Jangan Tertinggal: Paradoks Digitalisasi dan Peran Guru di Sekolah Dasar

dunia lain, sementara temannya di bangku sebelah tidak lagi ia ajak bicara. Empati, kepedulian, dan kemampuan bekerja sama tumbuh dari perjumpaan langsung: bermain bersama, berbagi bekal, bertengkar lalu berdamai. Layar tidak bisa menggantikan pengalaman itu.

Paradoks kedua menyangkut akses pengetahuan. Informasi melimpah, jawaban hanya sejauh satu ketukan jari, dan kecerdasan buatan dapat menyusun karangan dalam hitungan detik. Godaan untuk menyalin dan mengambil jalan pintas pun ikut membesar. Bagi anak usia sekolah dasar yang sedang membangun dasar kejujuran dan ketekunan, kemudahan ini bisa menjadi jebakan. Anak belajar bahwa hasil lebih penting daripada proses. Padahal tekun, jujur, dan bertanggung jawab hanya terbentuk ketika anak mengalami sendiri jerih payah belajar, termasuk kegagalannya.

Paradoks ketiga ada pada kecepatan. Dunia digital menawarkan hiburan instan, sedangkan karakter dibangun perlahan melalui pembiasaan. Anak yang terbiasa dengan video berdurasi belasan detik cenderung sulit bertahan pada hal yang menuntut kesabaran, seperti menyimak penjelasan guru, membaca satu halaman penuh, atau menunggu giliran. Rentang perhatian yang memendek berdampak pada kemampuan mengendalikan diri.

Paradoks keempat adalah soal keteladanan. Kita menuntut anak santun di dunia maya, tetapi ruang digital orang dewasa kerap dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, dan perundungan. Anak adalah peniru yang ulung. Mereka belajar bukan dari nasihat, melainkan dari apa yang mereka lihat.

Di titik inilah peran guru menjadi penentu. Teknologi dapat menyampaikan materi, tetapi ha-

nya guru yang dapat menyentuh hati. Aplikasi bisa mengoreksi jawaban, tetapi tidak bisa melihat raut kecewa seorang anak yang gagal, atau tahu kapan ia perlu dipeluk dengan kata-kata dan kapan perlu ditegur dengan tegas. Di ruang kelas, guru menjalankan setidaknya tiga peran yang tidak tergantikan mesin.

Pertama, guru adalah teladan hidup. Ketika guru datang tepat waktu, menyimpan gawai saat anak berbicara, bertutur santun, dan mengakui kekeliruan, siswa menyerap nilai itu tanpa perlu ceramah panjang. Bagi anak SD, karakter lebih banyak ditangkap daripada diajarkan.

Kedua, guru adalah pengarah penggunaan teknologi. Gawai dan layar hendaknya dipakai dengan tujuan yang jelas dalam pembelajaran, bukan sekadar pengisi waktu. Guru yang bijak memadukan video, aplikasi, atau kecerdasan buatan dengan diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Setiap tayangan diikuti pertanyaan: apa yang kamu pelajari, apa yang kamu rasakan, apa yang akan kamu lakukan? Dengan begitu teknologi memantik percakapan, bukan menggantikannya.

Ketiga, guru adalah pembentuk pembiasaan. Di kelas, guru menumbuhkan karakter lewat rutinitas kecil yang konsisten: berdoa bersama, piket kebersihan, antre dengan tertib, mendengarkan teman berbicara, dan menyelesaikan tugas dengan jujur. Guru juga perlu menjaga agar tugas-tugas yang menuntut pemikiran anak benar-benar dikerjakan dengan usaha sendiri, serta menghargai proses, bukan hanya hasil. Anak yang dipuji karena berusaha akan lebih tahan banting daripada anak yang hanya dipuji karena nilai.

Peran guru tentu tidak berdiri sendiri. Keluarga adalah benteng

pertama. Kesepakatan sederhana di rumah, seperti jam penggunaan gawai, waktu makan tanpa layar, dan pendampingan saat anak menonton, lebih efektif daripada larangan keras. Kerja sama antara guru dan orang tua, melalui komunikasi yang rutin, membuat pesan karakter di sekolah dan di rumah berjalan searah. Budaya lokal juga perlu dihidupkan kembali sebagai sumber nilai. Cerita rakyat, permainan tradisional, dan kearifan bahasa daerah menyimpan pelajaran tentang kejujuran dan hormat kepada sesama yang tidak tergantikan konten digital mana pun. Teknologi justru dapat membantu mendokumentasikan dan menyebarkannya.

Karena itu, guru pun perlu didukung. Pelatihan literasi digital, ruang untuk berbagi praktik baik, dan beban administrasi yang tidak menyita waktu mendidik akan menentukan seberapa leluasa guru menjalankan peran ini. Digitalisasi sekolah tidak boleh hanya menambah perangkat, tetapi harus menguatkan guru sebagai penjaga karakter.

Pada akhirnya, transformasi digital pendidikan akan dinilai bukan dari seberapa banyak perangkat yang masuk ke sekolah, melainkan dari seperti apa anak-anak yang keluar darinya. Apakah mereka cakap menggunakan teknologi sekaligus jujur, santun, tangguh, dan peduli? Jika ya, paradoks itu berhasil kita taklukkan.

Teknologi akan terus berubah, tetapi kebutuhan anak akan teladan tidak pernah berubah. Di tengah layar yang makin canggih, guru tetaplah cahaya yang menuntun karakter. (*)

Hadiri HUT Kota Baubau ke 25 Sebagai Daerah Otonom, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya Leluhur

perkuat persaudaraan dan kerja sama. Ia menyebut Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, hingga Bombana memiliki hubungan historis dengan Kesultanan Buton.

“Kita bicara Buton secara historis, di dalamnya juga ada Baubau. Wilayah-wilayah tersebut memiliki keterkaitan dengan sejarah Kesultanan Buton. Sebagai sahabat dan teman dari Buton Selatan, kita saling mendukung,” kata Adios.

Ia menilai pelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui seremoni, tetapi perlu diwujudkan dengan menjaga tradisi dan pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Kekayaan budaya Buton mencakup pakaian adat, tradisi lisan, kabanti, dan syair yang merekam nilai seni, pemikiran, serta kehidupan masyarakat pada masa lalu.

“Peradaban Buton memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari pakaian adat hingga tradisi lisan seperti kabanti dan syair. Nilai-nilai itu harus kita jaga,” ujarnya.

Dalam konteks sejarah, Kesultanan Buton merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam di kawasan timur Nusantara yang meninggalkan warisan pemerintahan, adat, dan kebudayaan. Sejarah tersebut

menjadi bagian dari perjalanan panjang pembentukan identitas masyarakat setempat, sekaligus memperlihatkan bagaimana tradisi lokal bertahan di tengah perubahan zaman. Pelestariannya memerlukan peran pemerintah, komunitas adat, keluarga, dan generasi muda.

Pada kesempatan itu, Adios juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari jadi Baubau. Ia berharap kota tersebut semakin maju, masyarakatnya sejahtera, dan penyelenggaraan pemerintahannya berjalan semakin baik. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, saya mengucapkan selamat Dirgahayu Baubau yang ke-485 dan Hari Jadi ke-25 sebagai daerah otonom,”tuturnya.

Upacara berlangsung khidmat dengan nuansa kearifan lokal. Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir pula Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Fasikin yang mewakili gubernur, anggota DPR RI, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos., M.Si., pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat kementerian dan instansi vertikal. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian sejarah dan budaya sekaligus kerja sama antardaerah yang memiliki akar historis serupa. (*)

agai wilayah Indonesia.

Dalam konteks global, komitmen memperluas akses pendidikan juga tercermin dalam Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua yang disepakati melalui konferensi internasional di Jomtien, Thailand, pada Maret 1990.

Di Buton Tengah, aktivitas pendidikan SRT 1 telah berjalan meskipun pembangunan kompleks sekolah belum sepenuhnya rampung. Perkembangan peserta didik selama setahun menjadi salah satu gambaran awal manfaat program tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya kesinambungan proses pembelajaran dan dukungan terhadap kebutuhan siswa.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyatakan komitmennya

untuk mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan. Azhari berharap SRT 1 terus berkembang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Open House Tahun Kedua SRT 1 Buton Tengah itu turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Buton Tengah Armin, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur TNI/Polri, Kepala SRT 1 Buton Tengah, kepala desa, Ketua Komite Sekolah, serta orang tua peserta didik. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayah itu. (*)

Setahun Berjalan, Bupati Azhari Apresiasi Kemajuan SRT 1 Buton Tengah Tunjukkan Perkembangan Peserta Didik

iran program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-

anak yang membutuhkan.

Program tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang mulai dijalankan pada

2025. Kementerian Sosial menetapkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak

dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pada Januari 2026, pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berb-

Baubau Gandeng Komdigi, Wali Kota H Yusran Fahim Pimpin Strategi Digitalisasi, Optimalkan Jaringan Palapa Ring Untuk Percepat Digitalisasi dan Pemerataan Internet hingga ke Kelurahan

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mempercepat transformasi digital, dengan fokus pada pemanfaatan jaringan serat optik nasional, peningkatan literasi digital, dan pemerataan konektivitas internet hingga tingkat kelurahan.

Program strategis tersebut dipaparkan dalam rapat di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Jumat (16/10/2026), yang dipimpin langsung Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E. Pertemuan itu melibatkan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBLSDM) Komdigi Makassar serta Koordinator Wilayah VI Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi.

Yusran mengatakan, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar penerapan teknologi informasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh agenda kerja sama disusun dan dilaksanakan secara terarah, terukur, serta berorientasi pada peningkatan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

“Keberadaan titik interkoneksi Palapa Ring Paket Tengah ini diharapkan dapat memberi dampak positif langsung bagi masyarakat luas, serta secara khusus dimanfaatkan oleh unit-unit pemerintah di Kota Baubau untuk menunjang efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Yusran.

Pemkot Baubau menaruh perhatian pada pemanfaatan Palapa Ring Paket Tengah yang melintasi wilayah tersebut. Infrastruktur ini diharapkan tidak hanya menjadi jalur transmisi data,



1

Pemanfaatan Jaringan Palapa Ring Paket Tengah

Mengoptimalkan infrastruktur serat optik nasional yang melintasi wilayah Baubau untuk mendukung layanan publik, pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi.

2

Peningkatan Literasi dan Kompetensi Digital

Kolaborasi dengan BBLSDM Komdigi untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

3

Pemerataan Akses Internet hingga Kelurahan

Perluasan konektivitas jaringan internet secara merata ke seluruh kelurahan untuk mengurangi kesenjangan digital dan memperluas akses layanan publik.

4

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Kolaborasi terpadu Pemkot Baubau dengan Komdigi, BBLSDM Makassar dan BAKTI Komdigi untuk memastikan seluruh agenda kerja sama tereksekusi secara terarah, terukur dan optimal.

5

Dukungan bagi Pelayanan Publik yang Lebih Efektif

Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan mempercepat layanan publik yang lebih mudah, cepat dan berkualitas bagi masyarakat.

tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, memperkuat layanan pemerintahan berbasis digital, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pub-

lik. Melalui kerja sama dengan BBLSDM dan BAKTI Komdigi, pemerintah juga menargetkan peningkatan kompetensi digital aparatur

serta masyarakat.

Secara nasional, Palapa Ring menjadi bagian dari upaya mengurangi kesenjangan konektivitas antardaerah. Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian proyek tersebut pada 14 Oktober 2019. Jaringan tulang punggung serat optik itu dibagi menjadi Paket Barat, Tengah, dan Timur untuk menghubungkan berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan yang sebelumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

Pada tingkat global, transformasi pemerintahan digital juga menjadi agenda penting. Survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemerintahan elektronik 2024 mencatat peningkatan perkembangan pemerintahan digital di berbagai negara, tetapi kesenjangan antarkawasan dan kemampuan layanan digital tingkat lokal masih menjadi tantangan. Konteks ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perlu disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas layanan.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., Sekretaris Daerah La Ode Darussalam, S.Sos., M.Si., para staf ahli wali kota, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat dan lurah se-Kota Baubau. Keterlibatan jajaran pemerintahan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pelaksanaan program digitalisasi agar manfaat konektivitas dan teknologi dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah kota.(*)

Momentum Kunjungan Kepala Komdigi Makassar, Pemkot Baubau Perkuat Fondasi Pemerintahan Berbasis Digital

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memperkuat percepatan transformasi digital dan integrasi layanan publik berbasis elektronik melalui kunjungan kerja Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Makassar, Drs. Baso Saleh, M.I.Kom., Jumat (16/10/2026). Agenda tersebut diarahkan untuk membahas pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan konektivitas jaringan informasi di Kota Baubau.

Kedatangan Baso Saleh di Bandara Betombangir. Setelah penyambutan, rombongan menuju Kantor Wali Kota Baubau untuk membahas program strategis pengembangan infrastruktur serta percepatan integrasi digitalisasi layanan publik. Pembahasan ini berkaitan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

yambutan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah pusat di bidang komunikasi dan digital.

Nuansa adat turut mewarnai prosesi penerimaan tamu. Wakil Wali Kota Baubau menyematkan kempurui, ikat kepala tradisional khas Buton, kepada Baso Saleh sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan di Tanah Wolio. Prosesi dilanjutkan dengan dokumentasi bersama di ruang VIP Bandara Betombangir.

Setelah penyambutan, rombongan menuju Kantor Wali Kota Baubau untuk membahas program strategis pengembangan infrastruktur serta percepatan integrasi digitalisasi layanan publik. Pembahasan ini berkaitan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis



1

Kunjungan Kepala Komdigi Makassar

2

Percepatan transformasi digital

3

Penguatan infrastruktur digital

4

Integrasi layanan publik berbasis elektronik (SPBE)

5

Pemerataan konektivitas informasi

6

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital

Elektronik (SPBE), yang menjadi salah satu instrumen pemer-

intah dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, keterpaduan

layanan, dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

Secara nasional,

digitalisasi pemerintahan berkembang seiring kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi. Dalam perkembangannya, tantangan yang perlu diatasi mencakup pemerataan infrastruktur, interoperabilitas sistem, keamanan data, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pada tingkat global, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui survei E-Government Survey secara berkala mengevaluasi perkembangan pemerintahan digital di berbagai negara. Tren internasional tersebut menunjukkan pent-

ingnya pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan publik sekaligus memastikan layanan digital dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi Baubau, penguatan konektivitas dan integrasi sistem menjadi bagian penting untuk mendukung arah pembangunan tersebut.

Kunjungan kerja Baso Saleh juga berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Baubau ke-485 dan Hari Ulang Tahun ke-25 Kota Baubau sebagai daerah otonom. Melalui koordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komdigi Makassar, Pemkot Baubau menargetkan penguatan konektivitas informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital, serta pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.(*)